

mengangkat dan memberhentikannya adalah presiden, melalui keputusan presiden (keppres).

Membicarakan jabatan tentu juga berkaitan dengan masa jabatan. Dalam UU Kejaksaan tidak dijelaskan secara definitif berapa lama masa jabatan Jaksa Agung, periode jabatan atau lama masa baktinya. Namun, berdasarkan konvensi ketatanegaraan sejak Indonesia merdeka masa jabatan Jaksa Agung disamakan dengan menteri-menteri sebagai anggota kabinet yang membantu presiden. Oleh karena itu masa jabatannya mengikuti masa bakti presiden yaitu 5 tahun. Walaupun demikian, presiden dengan hak prerogatifnya dapat sewaktu-waktu memberhentikannya dari jabatan dan mengangkat pejabat baru. Pengangkatan pejabat baru bisa karena satu dan lain sebab, misalnya perombakan (*reshuffle*) kabinet.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (periode 2004-2009) terjadi 2 kali *reshuffle* kabinet. Pada *reshuffle* kabinet yang kali kedua, Hendarman Supandji dilantik menggantikan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh. Hendarman terus menjabat hingga berakhirnya masa bakti presiden, wakil presiden dan Kabinet Indonesia Bersatu I (KIB I). Kemudian pasca pemilu presiden 2009 yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, pada tanggal 20 Oktober 2009 Kabinet Indonesia Bersatu I dibubarkan dan pada tanggal yang sama diumumkan pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) sekaligus pelantikannya untuk periode

- 23) Marwan Effendy, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*,
- 24) Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*,
- 25) Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi,
- 26) MKRI, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif; Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010*,
- 27) Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,
- 28) Nur Mufid dan Ahmad Nur Fuad, *Bedah Al-Aḥkām Al-Sulṭānīyah Al-Māwardī Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era ‘Abbāsiyyah*,
- 29) Nur Mufid, *Lembaga-Lembaga Politik Islam dalam Al-Aḥkām Al-Sulṭānīyah Karya Al-Māwardī*, Jurnal Qualita Ahsana Vol. 1 No. 2 Oktober 1999,
- 30) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,
- 31) Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif*, Hasil Penelitian, 2010
- 32) Riri Nazriyah, *Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden*, Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 2 Oktober 2010,
- 33) Tim Penyusun Buku Enam Tahun MK, *Enam Tahun Mengawal Konstitusi dan Demokrasi; Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas*

Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Dalam hal ini menjelaskan lama masa jabatan Jaksa Agung berdasarkan Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI [Pasal 22 Ayat (1) Huruf d].

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori yang menjelaskan masa jabatan *muhtasib* menurut *fiqh siyāsah* yang meliputi pengertian, kedudukan, perkembangan, tugas dan fungsi *wilāyah al-ḥisbah*, *wilāyah al-ḥisbah* sebagai lembaga penuntutan serta mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan *muhtasib*.

Bab ketiga berisi data penelitian yang memaparkan tentang penetapan masa jabatan Jaksa Agung berdasarkan Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010 yang menjelaskan Kejaksaan RI, *judicial review* UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI [Pasal 22 Ayat (1) Huruf d], istilah *conditionally constitutional* dan akibat hukum Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010.

Bab keempat adalah analisis yang menguraikan tinjauan fiqh siyāsah terhadap penetapan masa jabatan Jaksa Agung dengan pendekatan penalaran deduktif Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI [Pasal 22 Ayat (1) Huruf d].

Bab kelima memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

Kewenangan mengangkat dan memberhentikan seluruh pejabat negara di bawah khalifah termasuk pula dalam kekuasaan diskresi khalifah. Seorang pejabat hanya akan berhenti dari jabatannya' apabila diberhentikan oleh khalifah atau meninggal dunia. Demikian pula dalam masalah masa jabatan pejabat peradilan seperti *qādi* dan *muhtasib*. Tidak ada aturan batasan masa jabatan. Sepanjang tidak diberhentikan atau dipindahtugaskan oleh khalifah atau meninggal dunia *muhtasib* akan tetap menduduki jabatannya.

ibu kota negara dan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 UU No. 16 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Dibidang pidana: (a) melakukan penuntutan; (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidanapengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; (d) melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; (e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: (a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (b) pengamanan kebijakan penegakan hukum; (c) pengawasan peredaran barang cetakan; (d) pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; (e) pencegahan penyalahgunaan dan/atau

yang SK pengangkatannya oleh Jaksa Agung juga menjadi tidak sah secara hukum.

Pada tanggal 20 Oktober 2004 Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2004-2009. Pada tanggal itu juga diumumkan pembentukan dan pelantikan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dengan Keppres No.187 Tahun 2004 tentang Pembentukan KIB. Dengan demikian masa bakti KIB adalah 5 tahun, sesuai masa bakti Presiden. Pada pertengahan masa bakti KIB I ini Hendarman Supandji diangkat menjadi Jaksa Agung dengan Keppres No. 31/P Tahun 2007, tanggal 7 Mei 2007, dengan kedudukan setingkat Menteri Negara menggantikan dan meneruskan sisa masa kerja Jaksa Agung Abdurahman Saleh, yang diberhentikan dengan hormat pada pertengahan masa kerjanya, hingga akhir masa bakti KIB I tanggal 20 Oktober 2009.

Kemudian pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang baru Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono (SBY-Budiono) memenangkan Pemilu Presiden 2009 dan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2009. Pada tanggal itu juga diumumkan pembubaran KIB I dan pembentukan serta pelantikan KIB II untuk masa bakti 2009-2014. Keppres pemberhentian menteri-menteri KIB I dibacakan dan diteruskan pembacaan Keppres pengangkatan menteri-menteri baru dalam KIB II. Dalam Keppres pengangkatan dan pemberhentian tersebut nama Hendarman selaku Jaksa Agung tidak disebut oleh Presiden. Namun

mantan wakil sekretaris kabinet, yang memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Prof. Erman Rajagukguk: Jaksa Agung selalu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden di awal dan di akhir masa bakti kabinet.
- Prof. Bagir Manan: Jaksa Agung sebagai Jaksa berakhir masa jabatannya karena memasuki usia pensiun. Sementara Jaksa Agung sebagai pejabat setingkat Menteri Negara dan anggota kabinet, maka jabatannya itu berakhir bersama-sama dengan anggota kabinet yang lain. Merujuk kepada Keppres Nomor 187/M Tahun 2004 dan Keppres Nomor 31/P Tahun 2007, maka jabatan Hendarman Supandji telah berakhir pada tanggal 20 Oktober 2009. Sejak itu dia menduduki jabatan itu secara tidak sah. Segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang tidak sah, tidaklah membawa akibat hukum.
- Prof. Laica Marzuki: Jaksa Agung adalah *publieke ambt* atau jabatan publik. Mengutip Prof. Logemann, jabatan adalah person pribadi hukum yang bersifat abstrak yang tidak dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya. Karena itu ia harus diwakili oleh pemegang jabatan atau *ambtsdrager*. Jabatan bersifat langgeng dan abadi, sementara pemegang jabatan atau *ambtsdrager* datang dan pergi silih berganti. Masa jabatan Hendarman Supandji berdasarkan Keppres Nomor 187/M Tahun 2004 berakhir pada tanggal 20 Oktober 2009. Namun sejak itu dia tidak pernah

Fajrul Falakh, S.H., M.H., Prof. Dr. (Jur.) Adnan Buyung Nasution, S.H. dan Denny Indrayana, S.H., L.L.M., Ph.D., yang kesaksiannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Achmad Roestandi: Jaksa (bukan Jaksa Agung) adalah Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditentukan oleh usia pengangkatan dan usia pensiun. Jaksa Agung adalah pejabat negara yang pengangkatan dan pemberhentiannya tidak ada ketentuan yang mengaturnya, sehingga bisa saja Jaksa Agung dijabat seumur hidup. Jaksa Agung (Hendarman Supandji) meskipun belum diberhentikan dan tidak diangkat kembali dengan sendirinya tetap sah kedudukannya karena asas kontinuitas. Penentuan umur atau masa jabatan Jaksa Agung adalah wewenang DPR melalui *legislative review*, bukan wewenang MK (melalui *judicial review*).
- Prof. Philipus Hadjon, secara *ius constitutum*¹⁰, ada Keppres pengangkatan Hendarman sebagai Jaksa Agung, tetapi sampai saat ini belum pernah ada Keppres pemberhentian Hendarman sebagai Jaksa Agung, oleh karena itu Hendarman tetap sah sebagai Jaksa Agung.

¹⁰ Hukum positif, hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu, dalam daerah tertentu. Lawannya ialah *ius contituendum* yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang [Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Jakarta: Widyatamma, 2009), 216].

artinya hak-hak keuangannya, administrasinya, fasilitas-fasilitas lainnya itu diberikan setingkat dengan Menteri Negara.

- Denny Indrayana: Jabatan seumur hidup tidak berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Sepanjang Keppres Tahun 2007 belum dicabut, maka dasar hukum Hendarman Supandji masih menggunakan Keppres tersebut, meskipun terdapat konvensi ketatanegaraan bahwa masa jabatan Jaksa Agung sama dengan kabinet. Setingkat Menteri Negara, bukan berarti Menteri Negara. Di sini hanya terkait dengan masalah-masalah administrasi, terkadang protokoler. Kata 'Merdeka' dalam konstitusi hanya terkait masalah kekuasaan kehakiman. Masa jabatan pejabat negara memang berbeda-beda dan perbedaan itu merupakan politik hukum legislasi.

Kemudian keterangan dari pihak DPR yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pasal 22 Ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 berkaitan dengan Pasal 19 Ayat (2) UU *a quo*. Jadi berakhirnya masa jabatan Jaksa Agung bergantung pada keputusan Presiden. Sepanjang keputusan itu belum dikeluarkan, jabatan Jaksa Agung tetap sah.
- Jaksa Agung dinyatakan setingkat Menteri Negara dalam KIB tidak bermakna Menteri Negara dan Jaksa Agung berada dalam lingkup kedudukan jabatan yang sama karena UU yang mengaturnya berbeda.

Dari keenam jenis amar putusan tadi yang unik adalah putusan MK yang amar putusnya “ditolak” tetapi dalam pertimbangan hukumnya memberikan syarat konstitusionalitas atau menyatakan konstitusionalitas bersyarat (*conditionally constitutional*) pada salah satu ketentuan dalam UU.

Putusan-putusan MK yang dalam amar putusnya menggunakan klausul konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) didasarkan pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) bahwa permohonan yang dimohonkan uji tidak dapat diputus berdasarkan 3 jenis putusan yang telah diatur dalam UU MK namun permohonan tersebut beralasan. Dan penyelesaian perkara yang dimohonkan uji tersebut sebenarnya lebih tepat dilakukan melalui proses *legislative review* oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR bersama presiden, bukan melalui *judicial review* oleh MK. Namun karena *legislative review* memerlukan prosedur dan waktu yang relatif lama, maka sambil menunggu langkah tersebut mahkamah tetap memutus dengan memberikan penafsiran sebagai syarat konstitusional (*conditionally constitutional*) untuk berlakunya suatu norma yang dimohonkan uji. Dengan demikian mahkamah telah merumuskan norma baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam ilmu hukum dan hal inilah yang dinamakan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hal ini adalah dalam rangka menegakkan keadilan substantif yang oleh UUD 1945,

berakhirnya masa jabatan hakim dan *muhtasib* tidak didasarkan pada batasan masa bakti tertentu melainkan pada dua hal, pertama diberhentikan oleh khalifah, kedua, hakim meninggal dunia.

Dalam Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010 *rasio decidendinya* menyebutkan bahwa masalah penetapan masa jabatan lebih tepatnya adalah masalah kebijakan legislasi oleh legislator, DPR dan Presiden. Pada prakteknya, masa jabatan Jaksa Agung adalah 5 tahun atau dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh presiden. Kewenangan mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung di sini diberikan oleh undang-undang oleh karena itu disebut hak prerogatif. Berbeda halnya dengan kewenangan mengangkat dan memberhentikan *muhtasib* oleh khalifah yang tidak didasarkan pada undang-undang melainkan kepada diskresi yang dimiliki oleh khalifah. Dengan demikian tidak ada jangka waktu definitif berapa lama masa jabatan seorang *muhtasib*.

Kewenangan diskresi ini bersifat terbuka yang berpotensi disalahgunakan oleh karena itu diskresi dibatasi oleh undang-undang dan oleh praktik konvensi ketatanegaraan.--- (Lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, h. 220 dan 225; Jilid II, h. 32, dan Riri Nazriyah, *Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden*, h.18 dan 22.)

²³ Hak prerogatif adalah residu dari diskresi. Hak prerogatif terkait dengan kebijakan-kebijakan pelaksanaan undang-undang oleh presiden yang wewenangnya diberikan oleh undang-undang. Kewenangan presiden dalam bidang eksekutif terkait pelaksanaan administrasi negara yang umum dan yang khusus dituangkan dalam bentuk Keppres. Dalam hal ini seperti pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik. (Lihat Riri Nazriyah, *Pemberhentian Jaksa Agung dan Hak Prerogatif Presiden*, h.23). Dengan demikian, perbedaan diskresi dengan hak prerogatif adalah diskresi bersifat luas dan tidak diatur dalam undang-undang, sementara hak prerogatif lebih sempit, terbatas, dan diatur dalam undang-undang.

- Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2008
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta, Konpress, 2006
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2006
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-'Alam*, Beirut, Dār Al-Masyriq, 2007
- Marwan Effendy, *Kejaksaaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia, 2005
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2004
- Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta, Widyatamma, 2009
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, Gramedia, 2008
- MKRI, *Mengawal Demokrasi Menegakkan Keadilan Substantif; Refleksi Kinerja MK 2009 Proyeksi 2010*, Jakarta, 29 Desember 2009
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001
- Nur Mufid dan Ahmad Nur Fuad, *Bedah Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyah Al-Māwardi Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era 'Abasiyyah*, Surabaya, Pustaka Progressif, 2000
- Nur Mufid, *Lembaga-Lembaga Politik Islam dalam Al-Aḥkām Al-Sulṭāniyah Karya Al-Māwardi*, Jurnal Qualita Ahsana Vol. 1 No. 2 Oktober 1999, Surabaya, Puslit IAIN Sunan Ampel, 1999
- Patriata Westra, eds., *Ensiklopesi Administrasi*, Jakarta, CV. Haji Masagung, 1989
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 2001
- Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progressif*, Hasil Penelitian, 2010

